



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG**

Jl. By Pass Km 24 Anak Air, Batipuh Panjang, Koto Tangah
Padang, Sumatera Barat 25171 www.pta-padang.go.id, admin@pta-padang.go.id

Nomor : 2898/KPTA.W3-A/OT1.6/XII/2025

Padang, 1 Desember 2025

Lampiran : 1 Surat

Perihal : Penyusunan dan Penyampaian
Dokumen SAKIP

Yth. Ketua Pengadilan Agama
Se-Sumatera Barat

Assalamu'alaikum Wr, Wb

Meneruskan surat Sekretaris Mahkamah Agung RI nomor 16292/SEK/OT1.6/11/2025 tanggal 25 November 2025 sebagaimana pokok surat, diminta kepada Saudara untuk melakukan penyusunan dan penyampaian dokumen SAKIP dengan mempedomani surat Sekretaris Mahkamah Agung RI yang dimaksud.

Demikian hal ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih

Wassalam,





MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

SEKRETARIAT

Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 9-13, Telepon. (021) 3843348, Faksimile. (021) 3453553
Tromol Pos Nomor 1020 Jakarta 10110 www.mahkamahagung.go.id

Nomor : 16292 /SEK/OT1.6/11/2025

Jakarta, 25 November 2025

Sifat : Terbatas

Lampiran : Empat Berkas

Hal : Penyusunan dan Penyampaian Dokumen SAKIP

Yth. 1. Para Pejabat Eselon I Mahkamah Agung RI:
2. Para Kepala/Ketua Pengadilan Tingkat Banding;
3. Para Kepala/Ketua Pengadilan Tingkat Pertama;
Di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada di Bawahnya

Menindaklanjuti Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 167/KMA/SK.RA1.3/IX/2025 tentang Rencana Strategis Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2025 – 2029, Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 168/KMA/SK.RA1.3/IX/2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung dan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 27101/SEK/ SK.RA1.3/X/2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2025 – 2029, seluruh unit Eselon I, Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di Bawahnya wajib menyusun dokumen SAKIP yang terdiri dari:

1. Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU).
2. Revisi Indikator Kinerja Utama (IKU) bagi unit kerja yang telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Tahun 2025.
3. Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025 – 2029.
4. Revisi Rencana Strategis bagi unit kerja yang telah menetapkan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025 – 2029.
5. Revisi Rencana Kinerja Tahun 2026;
6. Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025;
7. Revisi Rencana Aksi Tahun 2025;
8. Monitoring dan Evaluasi atas Rencana Aksi Triwulan I - III Tahun 2025 berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025;
9. Revisi Monitoring dan Evaluasi atas Rencana Aksi Triwulan I - IV Tahun 2025 berdasarkan Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025;
10. Rencana Kinerja Tahun 2027;

11. Perjanjian Kinerja Tahun 2026;
12. Rencana Aksi Tahun 2026;
13. Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2024;
14. Laporan Kinerja Tahun 2025 dengan ketentuan: masing-masing Entitas Akuntabilitas Kinerja
 - a) Memuat pernyataan telah direviu pada halaman paling awal sebelum Kata Pengantar dan Formulir Reviu Laporan Kinerja menjadi Lampiran dalam Laporan Kinerja Tahun 2025
 - b) BAB II Perencanaan Kinerja pada Subbab Perjanjian Kinerja perlu disampaikan:
 - Perjanjian Kinerja Tahun 2025 sebelum terjadi revisi disertai dengan capaian kinerja akumulasi hingga September Tahun 2025.
 - Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025.
 - c) BAB III Akuntabilitas Kinerja pada Subbab Capaian Kinerja berdasarkan hasil pengukuran kinerja perbulan mulai Januari hingga Desember atas sasaran, indikator, dan target pada Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Hasil pengukuran kinerja perbulan tersebut juga menjadi Lampiran dalam Laporan Kinerja Tahun 2025.
 - d) Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2024 dijelaskan pada BAB III.

Seluruh Dokumen SAKIP berikut dengan revisinya disampaikan paling lambat tanggal 28 Februari 2026 melalui:

1. Aplikasi e-SAKIP REVIU oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada link <https://esr.menpan.go.id/>.
2. Aplikasi e-SAKIP pada link <https://batara.mahkamahagung.go.id/>.
3. Website masing-masing Satuan Kerja.

Bila diperlukan informasi lebih lanjut dapat menghubungi Sdri. Rina Alprini (081310606347).

Demikian hal ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.



Lampiran I : Surat Sekretaris Mahkamah Agung
Nomor : 16292 /SEK/OT1.6/11/2025
Tanggal : 25 November 2025

MONITORING DAN EVALUASI ATAS RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN (1) TRIWULAN I/II/III/IV
.....(2)

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	1.			
		2.			

NO	AKSI/KEGIATAN	URAIAN PROGRES PELAKSANAAN	URAIAN PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
2.	1.			
		2.			

NO	AKSI/KEGIATAN	URAIAN PROGRES PELAKSANAAN	URAIAN PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT

..... (3) (4)
..... (5)

(.....)(6)

Petunjuk Pengisian:

- (1) Tahun Pelaksanaan Kinerja
- (2) Entitas Akuntabilitas Kinerja
 - Unit Eselon I
 - Pengadilan Tingkat Banding
 - Pengadilan Tingkat Pertama
- (3) Lokasi Penetapan
- (4) Tanggal, Bulan dan Tahun Penetapan
- (5) Pimpinan Entitas Akuntabilitas Kinerja
 - Kepala Unit Eselon I
 - Ketua Pengadilan Tingkat Banding
 - Ketua Pengadilan Tingkat Pertama
- (6) Nama Pimpinan Entitas Akuntabilitas Kinerja

Lampiran II: Surat Sekretaris Mahkamah Agung
Nomor : 16292 /SEK/OT1.6/11/2025
Tanggal : 25 November 2025

FORMULIR REVIU LAPORAN KINERJA TAHUN (1)

.....(2)

No.		Pernyataan	Check List
1.	Format	<ol style="list-style-type: none">1. Laporan Kinerja (LKj) telah menampilkan data penting IP2. LKj telah menyajikan informasi target kinerja3. LKj telah menyajikan capaian kinerja IP yang memadai4. Telah menyajikan dengan lampiran yang mendukung informasi pada badan laporan5. Telah menyajikan upaya perbaikan ke depan6. Telah menyajikan akuntabilitas keuangan	
2.	Mekanisme penyusunan	<ol style="list-style-type: none">1. LKj IP disusun oleh unit kerja yang memiliki tugas fungsi untuk itu2. Informasi yang disampaikan dalam LKj telah didukung dengan data yang memadai3. Telah terdapat mekanisme penyampaian data dan informasi dari unit kerja ke unit penyusun LKj4. Telah ditetapkan penanggung jawab pengumpulan data/informasi di setiap unit kerja5. Data/informasi kinerja yang disampaikan dalam LKj telah diyakini keandalannya6. Analisis/penjelasan dalam LKj telah diketahui oleh unit kerja terkait7. LKj IP bulanan merupakan gabungan partisipasi dari dibawahnya.	
3.	Substansi	<ol style="list-style-type: none">1. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam perjanjian kinerja	

	2. Tujuan/sasaran dalam LKj telah selaras dengan rencana strategis	
	3. Jika butir 1 dan 2 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai	
	4. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam Indikator Kinerja	
	5. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam Indikator Kinerja Utama	
	6. Jika butir 4 dan 5 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai	
	7. Telah terdapat perbandingan data kinerja dengan tahun lalu, standar nasional dan sebagainya yang bermanfaat	
	8. IKU dan IK telah cukup mengukur tujuan/sasaran	
	9. Jika "tidak" telah terdapat penjelasan yang memadai	
	10. IKU dan IK telah SMART	

..... (3), (4)

Pereviu I

Pereviu II

(.....)

(.....)(5)

Petunjuk Pengisian:

- (1) Tahun Pelaksanaan Kinerja
- (2) Entitas Akuntabilitas Kinerja
 - Unit Eselon I
 - Pengadilan Tingkat Banding
 - Pengadilan Tingkat Pertama
- (3) Lokasi Penetapan
- (4) Tanggal, Bulan dan Tahun Penetapan
- (5) Nama Pereviu

Lampiran III : Surat Sekretaris Mahkamah Agung
Nomor : 16292 /SEK/OT1.6/11/2025
Tanggal : 25 November 2025

**PERNYATAAN TELAH DIREVIU
ATAS LAPORAN KINERJA TAHUN (1)**

.....(2)

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada (2)
untuk Tahun Anggaran(1) sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja.
Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab
manajemen (2).

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah
disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan
perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan
kinerja ini.

.....(3),(4)

Pereviu I

Pereviu II

(.....)

(.....)(5)

Petunjuk Pengisian:

- (1) Tahun Pelaksanaan Kinerja
- (2) Entitas Akuntabilitas Kinerja
 - Unit Eselon I
 - Pengadilan Tingkat Banding
 - Pengadilan Tingkat Pertama
- (3) Lokasi Penetapan
- (4) Tanggal, Bulan dan Tahun Penetapan
- (5) Nama Pereviu

Lampiran IV : Surat Sekretaris Mahkamah Agung
Nomor : 16292 /SEK/OT1.6/11/2025
Tanggal : 25 November 2025

MATRIKS TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN (1)

.....(2)

No	Rekomendasi LHE Tahun (1)	Permasalahan	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Target	Waktu Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Status/Progres Penyelesaian	Link Bukti Dukung

..... (3)(4)

.....(5)

(.....)(6)

Petunjuk Pengisian:

- (1) Tahun LHE
- (2) Entitas Akuntabilitas Kinerja
- (3) Lokasi Penetapan
- (4) Tanggal, Bulan dan Tahun Penetapan
- (5) Pimpinan Entitas Akuntabilitas Kinerja
- (6) Nama Pimpinan Entitas Akuntabilitas Kinerja

REVISI RENCANA AKSI TAHUN 2025

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu 2. Persentase pengiriman Salinan putusan tepat waktu oleh Pengadilan Tingkat Banding kepada Pengadilan Pengaju 3. Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh Pengadilan Tingkat Pertama kepada Para Pihak 4. Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak 5. Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak 6. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan 7. Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata 8. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif 9. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi 10. Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi 11. Persentase perkara perdata tingkat pertama dan tingkat banding yang menggunakan e-Court 12. Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu) 13. Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu) 	96,46% 100,00% 99,97% 91,01% 90,69% 90,11% 39,55% 10,48% 18,69% 97,00% 95,76% 89,80% 89,93%

1. KEPANITERAAN

NO	AKSI/KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN				KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	DANA
		I	II	III	IV				
1.	Koordinasi Percepatan Penyelesaian Perkara di Mahkamah Agung					Kegiatan	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	1044-Peningkatan Penyelesaian Perkara	Rp250.000.000

2.	Putusan Perkara Pidana				Perkara	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	1044-Peningkatan Penyelesaian Perkara	Rp10.218.452.000
3.	Putusan Perkara Pidana Militer				Perkara	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	1044-Peningkatan Penyelesaian Perkara	Rp308.124.000
4.	Penyelesaian Perkara PHI yang nilai gugatannya dibawah 150jt				Perkara	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	1044-Peningkatan Penyelesaian Perkara	Rp633.461.000

2. BADAN PERADILAN UMUM

NO	AKSI/KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN				KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	DANA
		I	II	III	IV				
1.	Bimbingan Teknis tentang Perempuan yang berhadapan dengan Hukum					Orang	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	1046 - Pengembangan Tenaga Teknis Peradilan Umum	Rp1.226.675.000
2.	Koordinasi Percepatan Penyelesaian Perkara di Lingkungan Peradilan Umum					Kegiatan	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	1049-Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Rp850.000.000
3.	Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan melalui Pembebasan Biaya Perkara					Perkara	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	1049-Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Rp360.000.000
4.	Sidang di luar Gedung Pengadilan					Perkara	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	1049-Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Rp8152.000.000
5.	Perkara Pidana Yang Diselesaikan di Tingkat Banding di wilayah Barat					Perkara	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	1049-Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Rp2.174.359.000
6.	Perkara Pidana Korupsi Yang Diselesaikan di Tingkat Banding di wilayah Barat					Perkara	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	1049-Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Rp450.833.000
7.	Perkara Pidana yang Diselesaikan Ditingkat Pertama di wilayah Barat					Perkara	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	1049-Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Rp31.892.677.000

8.	Perkara Pidana Korupsi yang Diselesaikan Ditingkat Pertama di Wilayah Barat				Perkara	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	1049-Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Rp990.489.000
9.	Perkara PHI (dibawah 150 juta) yang Diselesaikan di Tingkat Pertama di wilayah Barat				Perkara	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	1049-Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Rp1.676.867.000
10.	Perkara Pidana Yang Diselesaikan di Tingkat Banding di wilayah Tengah				Perkara	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	1049-Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Rp1.153.264.000
11.	Perkara Pidana Korupsi Yang Diselesaikan di Tingkat Banding di wilayah Tengah				Perkara	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	1049-Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Rp266.473.000
12.	Perkara Pidana yang Diselesaikan Ditingkat Pertama di wilayah Tengah				Perkara	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	1049-Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Rp11.831.801.000
13.	Perkara Pidana Korupsi yang Diselesaikan Ditingkat Pertama di Wilayah Tengah				Perkara	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	1049-Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Rp537.180.000
14.	Perkara PHI (dibawah 150 juta) yang Diselesaikan di Tingkat Pertama di wilayah Tengah				Perkara	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	1049-Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Rp386.751.000
15.	Perkara Pidana Yang Diselesaikan di Tingkat Banding di wilayah Timur				Perkara	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	1049-Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Rp191.488.000
16.	Perkara Pidana Korupsi Yang Diselesaikan di Tingkat Banding di wilayah Timur				Perkara	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	1049-Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Rp110.457.000
17.	Perkara Pidana yang Diselesaikan Ditingkat Pertama di wilayah Timur				Perkara	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	1049-Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Rp1.461.773.000
18.	Perkara Pidana Korupsi yang Diselesaikan Ditingkat Pertama di Wilayah Timur				Perkara	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	1049-Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Rp179.985.000

19.	Perkara PHI (dibawah 150 juta) yang Diselesaikan di Tingkat Pertama di wilayah Timur					Perkara	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	1049-Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Rp91.748.000
-----	--	--	--	--	--	---------	---------------------------------------	---	--------------

3. BADAN PERADILAN AGAMA

NO	AKSI/KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN				KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	DANA
		I	II	III	IV				
1.	Koordinasi Percepatan Penyelesaian Perkara di Lingkungan Peradilan Agama					kegiatan	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	1053-Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Rp850.000.000
2.	Layanan Mediator Eksternal di Pengadilan					Orang	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	1053-Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Rp116.1000.000
3.	Penyelesaian Administrasi Perkara Jinayah					Perkara	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	1053-Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Rp124.965.000
4.	Perkara di Lingkungan Peradilan Agama yang diselesaikan melalui pembebasan biaya perkara					Perkara	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	1053-Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Rp9.879.161.000
5.	Perkara di Lingkungan Peradilan Agama yang diselesaikan melalui sidang di luar gedung					Perkara	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	1053-Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Rp20.882.166.000
6.	Perkara di Lingkungan Peradilan Agama yang diselesaikan melalui sidang terpadu					Perkara	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	1053-Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Rp2.443.888.000
7.	Perkara yang diselesaikan melalui Sidang Itsbat Nikah diluar Negeri					Perkara	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	1053-Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Rp921.945.000
8.	Bimbingan Teknis Kaum Rentan Berhadapan dengan Hukum					Orang	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	7019 - Pengembangan Tenaga Teknis Peradilan Agama	Rp841.387.000

4. BADAN PERADILAN MILITER DAN TATA USAHA NEGARA

NO	AKSI/KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN				KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	DANA
		I	II	III	IV				
1.	Koordinasi Percepatan Penyelesaian Perkara di Lingkungan Peradilan Militer					Kegiatan	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	1058-Peningkatan Manajemen Peradilan Militer	Rp100.000.000
2.	Perkara Perbedaan Pendapat yang Diselesaikan di Pengadilan Militer Utama					Perkara	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	1058-Peningkatan Manajemen Peradilan Militer	Rp4.970.000
3.	Perkara Pidana Tingkat Banding yang Diselesaikan di Pengadilan Militer Utama dan Pengadilan Militer Tinggi I s.d III					Perkara	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	1058-Peningkatan Manajemen Peradilan Militer	Rp172.200.000
4.	Perkara Pidana Tingkat Pertama yang Diselesaikan di Pengadilan Militer Tinggi I s.d III dan Pengadilan Militer I - 01 s.d III - 18					Perkara	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	1058-Peningkatan Manajemen Peradilan Militer	Rp2.555.039.000
5.	Perkara Pidana Tingkat Pertama yang Diselesaikan di Pengadilan Militer III - 19 Jayapura					Perkara	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	1058-Peningkatan Manajemen Peradilan Militer	Rp512.485.000
6.	Perkara Pelanggaran Lalu Lintas yang Diselesaikan di Pengadilan Militer Tinggi I s.d III dan Pengadilan Militer I - 01 s.d III - 18					Perkara	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	1058-Peningkatan Manajemen Peradilan Militer	Rp34.866.000
7.	Perkara Pelanggaran Lalu Lintas yang Diselesaikan di Pengadilan Militer III - 19 Jayapura					Perkara	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	1058-Peningkatan Manajemen Peradilan Militer	Rp10.320.000
8.	Perkara yang dilayani melalui sidang di luar gedung di lingkungan Peradilan Militer					Perkara	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	1058-Peningkatan Manajemen Peradilan Militer	Rp2.663.253.000

9.	Koordinasi Percepatan Penyelesaian Perkara di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara				Kegiatan	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	1059 - Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara	Rp200.000.000
10.	Perkara Peradilan Tata Usaha Negara yang diselesaikan melalui Pembebasan Biaya Perkara				Perkara	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	1059 - Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara	Rp6.075.000
11.	Perkara yang dilayani melalui sidang di luar gedung dilingkungan peradilan Tata Usaha Negara				Perkara	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	1059 - Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara	Rp760.190.000

RENCANA AKSI TAHUN 2025

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
2	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	1. Indeks Kepatuhan Pelaporan LHKPN 2. Persentase Penanganan Pengaduan yang Tepat Waktu 3. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Ditindaklanjuti 4. Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan Berdasarkan Standar Layanan yang Ditetapkan	98,00% 70,00% 85,00% 3,78

1. Badan Peradilan Umum

NO	AKSI/KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN				KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	DANA
		I	II	III	IV				
1.	Pembinaan dan Pengawasan Aparatur Tenaga Teknis di Lingkungan Peradilan Umum					kegiatan	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	1049 - Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Rp6.642.871.000
2.	Monitoring putusan yang ditindaklanjuti (eksekusi) di Lingkungan Peradilan Umum					kegiatan	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	1049 - Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Rp5.760.000
3.	Bimbingan Teknis Percepatan Penyelesaian Perkara					orang	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	1049 - Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Rp2.436.117.000
4.	Layanan Pos Bantuan Hukum di lingkungan Peradilan Umum					Orang	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	1049 - Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Rp13.136.800.000

2. BADAN PERADILAN AGAMA

NO	AKSI/KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN				KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	DANA
		I	II	III	IV				
1.	Koordinasi dan Pemantauan Layanan Pengadilan Wilayah Barat					kegiatan	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	1053-Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Rp2.358.850.000
2.	Koordinasi dan Pembinaan Implementasi Restorative Justice					kegiatan	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	1053-Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Rp283.636.000
3.	Koordinasi dan Pemantauan Layanan Pengadilan Wilayah Tengah					kegiatan	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	1053-Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Rp1.932.405.000
4.	Koordinasi dan Pemantauan Layanan Pengadilan Wilayah Timur					kegiatan	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	1053-Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Rp641.400.000
5.	Koordinasi Pengelolaan PNBP					kegiatan	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	1053-Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Rp4.684.635.000
6.	Layanan Pos Bantuan Hukum di Lingkungan Peradilan Agama					Orang	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	1053-Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Rp22.607.700.000
7.	Naskah Kesyariahan					Rekomendasi Kebijakan	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	1056 - Peningkatan Ketatalaksanaan Perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali (PK) serta Kesyariahan	Rp496.776.000

3. BADAN PERADILAN MILITER DAN TATA USAHA NEGARA

NO	AKSI/KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN				KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	DANA
		I	II	III	IV				
1.	Monitoring Kebijakan Pelayanan Peradilan Militer					Kegiatan	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	1058-Peningkatan Manajemen Peradilan Militer	Rp277.000

2.	Pengawasan dan Pengamatan Lembaga Pemasyarakatan Militer				Kegiatan	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	1058-Peningkatan Manajemen Peradilan Militer	Rp380.600.000
3.	Bimbingan Teknis Kompetensi Penyelesaian Perkara				Orang	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	1058-Peningkatan Manajemen Peradilan Militer	Rp758.966.000
4.	Bimbingan Teknis tentang Perempuan yang berhadapan dengan Hukum di Lingkungan Peradilan Militer				Orang	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	1058-Peningkatan Manajemen Peradilan Militer	Rp250.000.000
5.	Monitoring Kebijakan Pelayanan Peradilan Tata Usaha Negara				Kegiatan	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	1059 - Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara	Rp479.930.000
6.	Dukungan Penyelesaian Perkara				Kegiatan	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	1059 - Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara	Rp303.755.000
7.	Bimbingan Teknis Kompetensi Penyelesaian Perkara				Kegiatan	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	1059 - Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara	Rp1.063.630.000
8.	Layanan Pos Bantuan Hukum di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara				Orang	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	1059 - Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara	Rp1.122.800.000
9.	Bimbingan Teknis tentang Perempuan yang berhadapan dengan Hukum di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara				Orang	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	1059 - Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara	Rp350.000.000

4. Badan Pengawasan

NO	AKSI/KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN				KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	DANA
		I	II	III	IV				
1.	Layanan Audit Internal					Laporan	Program Dukungan Manajemen	1077 - Pengawasan Pelaksanaan Teknis, Administrasi Peradilan, Administrasi Umum, Penanganan Pengaduan Inspektur Wilayah I, II, III, IV	Rp30.435.648.000

RENCANA AKSI TAHUN 2025

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
3	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	1. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2. Nilai Kinerja Anggaran 3. Nilai Sistem Merit 4. Indeks Pengelolaan Aset 5. Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional 6. Predikat Opini Laporan Keuangan	73 90 203 3,75 94 WTP

1. Kepaniteraan

NO	AKSI/KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN				KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	DANA
		I	II	III	IV				
1.	Layanan BMN					Layanan	Program Dukungan Manajemen	6242 - Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Kepaniteraan	Rp200.000.000
2.	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal					Layanan	Program Dukungan Manajemen	6242 - Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Kepaniteraan	Rp7.360.843.000
3.	Layanan Perkantoran					Layanan	Program Dukungan Manajemen	6242 - Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Kepaniteraan	Rp193.168.457.000
4.	Layanan Manajemen SDM					Orang	Program Dukungan Manajemen	6242 - Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Kepaniteraan	Rp1.775.292.000
5.	Layanan Manajemen Keuangan					Laporan	Program Dukungan Manajemen	6242 - Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Kepaniteraan	Rp833.092.000
6.	Layanan Sarana Internal					Unit	Program Dukungan Manajemen	6242 - Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Kepaniteraan	Rp1.223.474.000

2. BADAN PERADILAN UMUM

NO	AKSI/KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN				KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	DANA
		I	II	III	IV				
1.	Layanan BMN					Layanan	Program Dukungan Manajemen	6243 - Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Badan Peradilan Umum	Rp1.100.000
2.	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal					Layanan	Program Dukungan Manajemen	6243 - Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Badan Peradilan Umum	Rp2. 885.079.000
3.	Layanan Umum					Layanan	Program Dukungan Manajemen	6243 - Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Badan Peradilan Umum	Rp5.783.621.000
4.	Layanan Perkantoran					Layanan	Program Dukungan Manajemen	6243 - Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Badan Peradilan Umum	Rp33.396.429.000
5.	Layanan Data dan Informasi					Dokumen	Program Dukungan Manajemen	6243 - Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Badan Peradilan Umum	Rp1.650.106.000

3. BADAN PERADILAN AGAMA

NO	AKSI/KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN				KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	DANA
		I	II	III	IV				
1.	Layanan BMN					Layanan	Program Dukungan Manajemen	6244 - Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Badan Peradilan Agama (Badilag)	Rp139.000.000
2.	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal					Layanan	Program Dukungan Manajemen	6244 - Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Badan Peradilan Agama (Badilag)	Rp2.254.067.000
3.	Layanan Umum					Layanan	Program Dukungan Manajemen	6244 - Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Badan Peradilan Agama (Badilag)	Rp140.175.000
4.	Layanan Data dan Informasi					Layanan	Program Dukungan Manajemen	6244 - Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Badan Peradilan Agama (Badilag)	Rp1.367.029.000

5.	Layanan Perkantoran				Layanan	Program Dukungan Manajemen	6244 - Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Badan Peradilan Agama (Badilag)	Rp31.315.645.000
----	---------------------	--	--	--	---------	----------------------------	--	------------------

4. BADAN PERADILAN MILITER DAN TATA USAHA NEGARA

NO	AKSI/KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN				KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	DANA
		I	II	III	IV				
1.	Layanan BMN					Layanan	Program Dukungan Manajemen	6245 - Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara (Badilmiltun)	Rp8.340.000
2.	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal					Layanan	Program Dukungan Manajemen	6245 - Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara (Badilmiltun)	Rp1.433.556.000
3.	Layanan Data dan Informasi					Layanan	Program Dukungan Manajemen	6245 - Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara (Badilmiltun)	Rp874.099.000
4.	Layanan Perkantoran					Layanan	Program Dukungan Manajemen	6245 - Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara (Badilmiltun)	Rp15.150.438.000

5. BADAN STRATEGI DAN PELATIHAN DAN PENDIDIKAN HUKUM DAN PERADILAN

NO	AKSI/KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN				KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	DANA
		I	II	III	IV				
1.	Layanan Umum					Layanan	Program Dukungan Manajemen	1075 - Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan	Rp4.629.595.000

2.	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal					Layanan	Program Dukungan Manajemen	1075 - Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan	Rp1.145.564.000
3.	Layanan Data dan Informasi					Layanan	Program Dukungan Manajemen	1075 - Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan	Rp742.638.000
4.	Layanan Perkantoran					Layanan	Program Dukungan Manajemen	1075 - Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan	Rp50.069.762.000

6. BADAN PENGAWASAN

NO	AKSI/KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN				KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	DANA
		I	II	III	IV				
1.	Layanan Umum					Layanan	Program Dukungan Manajemen	1079 - Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Badan Pengawasan Mahkamah Agung	Rp512.654.000
2.	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal					Layanan	Program Dukungan Manajemen	1079 - Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Badan Pengawasan Mahkamah Agung	Rp476.901.000
3.	Layanan Data dan Informasi					Layanan	Program Dukungan Manajemen	1079 - Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Badan Pengawasan Mahkamah Agung	Rp298.250.000
4.	Layanan Perkantoran					Layanan	Program Dukungan Manajemen	1079 - Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Badan Pengawasan Mahkamah Agung	Rp47.060.355.000

7. BADAN URUSAN ADMINISTRASI

NO	AKSI/KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN				KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	DANA
		I	II	III	IV				
1.	Layanan Perkantoran					Layanan	Program Dukungan Manajemen	1064 - Peningkatan Pelayanan Informasi pada Mahkamah Agung dan Pengadilan Semua Lingkungan Peradilan	Rp15.530.795.000
2.	Layanan Hukum					Layanan	Program Dukungan Manajemen	1064 - Peningkatan Pelayanan Informasi pada Mahkamah Agung dan Pengadilan Semua Lingkungan Peradilan	Rp16.787.996.000
3.	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi					Layanan	Program Dukungan Manajemen	1064 - Peningkatan Pelayanan Informasi pada Mahkamah Agung dan Pengadilan Semua Lingkungan Peradilan	Rp425.800.000
4.	Layanan Data dan Informasi					Layanan	Program Dukungan Manajemen	1064 - Peningkatan Pelayanan Informasi pada Mahkamah Agung dan Pengadilan Semua Lingkungan Peradilan	Rp3.000.287.000
5.	Penyusunan Pedoman Peradilan					Rancangan Standar	Program Dukungan Manajemen	1064 - Peningkatan Pelayanan Informasi pada Mahkamah Agung dan Pengadilan Semua Lingkungan Peradilan	Rp500.000.000
6.	Pengembangan Sistem Penanganan Perkara					Layanan	Program Dukungan Manajemen	1064 - Peningkatan Pelayanan Informasi pada Mahkamah Agung dan Pengadilan Semua Lingkungan Peradilan	Rp6.000.000.000
7.	Layanan Manajemen SDM					Orang	Program Dukungan Manajemen	1065 - Pembinaan Administrasi Pengelolaan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	Rp19.734.385.000
8.	Layanan Perkantoran					Layanan	Program Dukungan Manajemen	1066 - Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Rp4.122.142.962.000

9.	Layanan Manajemen Keuanga				Dokumen	Program Dukungan Manajemen	1066 - Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Rp34.327.994.000
10.	Layanan Perencanaan dan Penganggaran				Dokumen	Program Dukungan Manajemen	1067 - Pelaksanaan Penyusunan Perencanaan dan Anggaran serta Penataan Organisasi Mahkamah Agung	Rp5.331.481.000
11.	Layanan Pemantauan dan Evaluasi				Dokumen	Program Dukungan Manajemen	1067 - Pelaksanaan Penyusunan Perencanaan dan Anggaran serta Penataan Organisasi Mahkamah Agung	Rp1.360.772.000
12.	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal				Layanan	Program Dukungan Manajemen	1067 - Pelaksanaan Penyusunan Perencanaan dan Anggaran serta Penataan Organisasi Mahkamah Agung	Rp8.861.069.000
13.	Penyusunan Rancangan Kebijakan Penguatan Kelembagaan Mahkamah Agung				Rancangan Standar	Program Dukungan Manajemen	1067 - Pelaksanaan Penyusunan Perencanaan dan Anggaran serta Penataan Organisasi Mahkamah Agung	Rp1.500.000.000
14.	Layanan Data dan Informasi				Layanan	Program Dukungan Manajemen	1068 - Pembinaan Administrasi Pengelolaan Perlengkapan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya	Rp3.703.416.000
15.	Layanan Manajemen Keuangan				Layanan	Program Dukungan Manajemen	1068 - Pembinaan Administrasi Pengelolaan Perlengkapan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya	Rp1.822.422.000
16.	Layanan Perkantoran				Layanan	Program Dukungan Manajemen	1069 - Dukungan Pelayanan Pimpinan Mahkamah Agung dan Tugas Teknis Lainnya	Rp5.700.000.000
17.	Layanan Umum				Layanan	Program Dukungan Manajemen	1069 - Dukungan Pelayanan Pimpinan Mahkamah Agung dan Tugas Teknis Lainnya	Rp14.102.937.000

18.	Layanan Perkantoran				Layanan	Program Dukungan Manajemen	1070 - Pelaksanaan Pembinaan Keamanan, Urusan Tata Usaha, Rumah Tangga, Bina Sikap Mental di Lingkungan Mahkamah Agung	Rp210.367.587.000
19.	Layanan Umum				Layanan	Program Dukungan Manajemen	1070 - Pelaksanaan Pembinaan Keamanan, Urusan Tata Usaha, Rumah Tangga, Bina Sikap Mental di Lingkungan Mahkamah Agung	Rp930.060.000
20.	Layanan Sarana Internal				Unit	Program Dukungan Manajemen	1071 - Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	Rp147.974.000.000
21.	Layanan Prasarana Internal				M2	Program Dukungan Manajemen	1071 - Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	Rp73.279.500.000
22.	Layanan Umum				Rupiah	Program Dukungan Manajemen	6986 - Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama	Rp1.390.770.000
23.	Layanan Perkantoran				Rupiah	Program Dukungan Manajemen	6986 - Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama	Rp6.183.724.871.000
24.	Layanan Pemantauan dan Evaluasi				Dokumen	Program Dukungan Manajemen	6986 - Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama	Rp276.856.000

Sumber data: Aplikasi KRISNA – RENSTRAKL 2025 - 2029 <https://ma.kl.krisna.systems/renstrakl/2025-2029/renstrakl-v2-main>

